

# JURNAL KOMUNIKASI

---

---

Volume 1, Nomor 2, April 2007

ISSN 1907-848X

Halaman 97 - 188

---

---

## DAFTAR ISI

### Editorial

**Pers dan Teknologi Media:  
Dejurnalisasi di Tengah Konvergensi**  
*Didik Supriyanto - Iwan Awaluddin Yusuf*  
( 97 - 109 )

**Citizen Journalism:  
Ketika Berita Tidak Hanya Memiliki Satu Muka**  
*Zaki Habibi*  
( 110 - 120 )

**Aplikasi Nilai-nilai Jurnalisme Warga pada Radio Komunitas**  
*A. Darmanto*  
( 121 - 132 )

**Kegagalan Jurnalisme Profesional  
dan Kemunculan Jurnalisme Publik**  
*Puji Rianto*  
( 133 - 145 )

**Jurnalisme Publik pada Media Penyiaran Publik**  
*Masduki - Bambang Muryanto*  
( 147 - 154 )

**Praktik "Jurnalisme Syariah" di Radio MQ FM Yogyakarta**  
*Abdul Rohman*  
( 155 - 162 )

**Jurnalisme Bencana: Sebuah Tinjauan Etis**  
*Muzayin Nazaruddin*  
( 163 - 177 )

**Mewaspadaai Praktik Jurnalisme yang Memproduksi Keburukan**  
*Ana Nadhya Abrar*  
( 179 - 188 )

# Mewaspadaai Praktik Jurnalisme yang Memproduksi Keburukan

Ana Nadhya Abrar<sup>1</sup>

## Abstract

*Journalism could be a tool to produce news stories bombastically. Bombastic news on bad reality could produce bad things. In order not to make journalism producing bad things, we have to have some principles in reporting bad realities. The article suggests one principle: to present bad reality as the way it is. The practice of this principle is not so difficult since the fact has shown that the Indonesian press has been made public sphere on bad realities successfully. However, in practicing this principle, the journalists still place their selves as doers in profession and doers in media.*

## Key words:

*Bad news, bombastic journalism, direct journalism, public sphere*

## Pendahuluan

Kelahiran surat kabar *Rakyat Merdeka* berkaitan dengan surat kabar *Merdeka* yang didirikan B.M. Diah. Awal tahun 1999, karyawan *Merdeka* menuntut manajemen *Merdeka* untuk membagi sahamnya sebesar 20% kepada karyawan. Manajemen *Merdeka* tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, sebagian besar karyawan menyatakan keluar dari surat kabar tersebut.

Melihat keadaan itu, kelompok *Jawa Pos* menangkap sebuah peluang. Kelompok ini merasa bahwa bekas karyawan *Merdeka* tersebut bisa ditampung untuk mendirikan surat kabar baru. Setelah persiapan yang tidak begitu lama, akhirnya pada 22 April 1999 berdirilah *Rakyat Merdeka* secara resmi. Sebagai semboyan, *Rakyat Merdeka* memilih rangkaian kata: *the politics news leader*. Dari semboyan tersebut terlihat, *Rakyat Merdeka* mengorientasikan isinya untuk bacaan para politisi atau khalayak yang berminat mengikuti perkembangan politik di negeri ini.

Lalu apakah jurnalisme yang ideal untuk khalayak seperti tersebut di atas? Teguh Santosa, redaktur eksekutif/penanggung jawab *Rakyat Merdeka* mengatakan, jurnalisme *Rakyat Merdeka* adalah jurnalisme biasa. "Genre jurnalisme kami tidak merujuk pada ilmu komunikasi. *Rakyat Merdeka* ingin mencoba jujur, terbuka, blak-blakan dan menghilangkan jarak antara pembaca dan kami di ruang redaksi"<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Dosen Fisipol UGM, Pemimpin Redaksi *Kabar UGM*.

<sup>2</sup> Wawancara dengan penulis di Kantor Redaksi *Rakyat Merdeka*, Jakarta, 22 Maret 2006.

Ketika didesak tentang nama jurnalisme *Rakyat Merdeka*, Teguh Santosa mengatakan, jurnalisme “*to the point*”. Lewat nama ini, Santosa menegaskan bahwa *Rakyat Merdeka* ingin menampilkan berita apa adanya. “Kita ingin menampilkan berita seperti kita bercerita kepada teman, kolega dan kepada orang yang mungkin perlu diberi tahu. Bagaimanapun persoalan yang dilihat oleh jurnalis kami juga dilihat oleh masyarakat biasa. Jadi, tak ada eksklusifitas”<sup>3</sup>.

Dari pengamatan memang terlihat beberapa contoh berita yang seperti ingin bercerita kepada teman dan kolega. Lihatlah judul berita berikut: “Mbah Tardjo Pun Geleng Kepala”, “Penjarah Duit Rakyat Jangan Diampuni”, “Kepala Intelijen Diprotes, Elit Parpol Segera Dikumpulkan: Amien Ngumpet Terus”. Semua judul berita itu disiarkan *Rakyat Merdeka* tanggal 22 Maret 2006. Ketiga judul berita tersebut merupakan ungkapan yang tegas dan biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, ungkapan itu merupakan tuturan yang punya kedekatan dengan khalayak.

Namun, judul berita yang ketiga bernada bombastis. Judul tersebut terkesan berlebih-lebihan. Bagaimana mungkin seorang tokoh politik seperti Amien Rais bersembunyi karena ada rumor bahwa ia adalah seorang provokator dalam kerusuhan di Abepura. Amien Rais adalah seorang tokoh reformasi yang ikut berjuang menumbangkan rezim Orde Baru. Ia adalah juga bekas Ketua MPR dan masih menjadi tokoh Partai Amanat Nasional.

Kalau dilihat lebih jauh, ciri-ciri jurnalisme “*to the point*” yang menonjol adalah menghindarkan pemakaian eufemisme<sup>4</sup>. Ia akan menggunakan istilah apa adanya, sekalipun makna itu terasa tidak biasa didengar khalayak. Sebuah contoh yang disampaikan Teguh Santosa adalah keberhasilan polisi menangkap maling. Bagi *Rakyat Merdeka* keberhasilan itu bukan prestasi, tapi kewajiban. Bagaimanapun tugas polisi memang menangkap maling. “Jadi, tidak ada yang luar biasa di situ,” tambah Teguh.

Dengan kata yang lugas, makna yang sampai ke pikiran khalayak pun jadi tegas dan kuat. Khalayak punya *sense* yang kuat tentang informasi yang dikandung berita. Akibat selanjutnya, khalayak bisa menggunakan informasi tersebut sebagai pedoman yang akurat dalam kegiatan mereka.

Lalu siapa pencetus kelahiran jurnalisme “*to the point*”? Menurut Teguh Santosa, jurnalisme “*to the point*” dicetuskan oleh pendiri *Rakyat Merdeka*, Margiono<sup>5</sup>. “Margiono mengatakan bahwa jurnalisme *Rakyat Merdeka* adalah

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan penulis di Kantor Redaksi *Rakyat Merdeka*, Jakarta, 22 Maret 2006.

<sup>4</sup> Ciri ini dimiliki juga oleh jurnalisme *Media Indonesia*.

<sup>5</sup> Ketika wawancara dilakukan, Margiono sudah menjabat Direktur *Jawa Pos*. Tetapi, namanya tercantum sebagai salah seorang anggota Dewan Kebijakan Redaksi *Rakyat Merdeka*.

jurnalisme yang berani menyimpulkan fakta yang ada di lapangan. Jadi bukan jurnalisme imajinatif”.<sup>6</sup>

Bisa saja *Rakyat Merdeka* memang ingin mempraktikkan jurnalisme “*to the point*”, tetapi, keinginan tersebut tidak selalu bisa dilaksanakan dengan baik. Judul berita tentang kelanjutan kerusuhan Abepura di atas memperlihatkan bahwa *Rakyat Merdeka* tanpa terasa mempraktikkan jurnalisme bombastis. Ini diperkuat oleh beberapa judul berita yang pernah disiarkan *Rakyat Merdeka*, seperti “Mulut Mega Bau Solar” (6 Januari 2003), “Mega Cuma Sekelas Bupati” (4 Februari 2003), dan “Mega Lintah Darat” (8 Januari 2003).

Demikian sekelumit tulisan dalam disertasi saya berjudul *The Press Inclination in Reporting the Parliament: Learning from the Three Major Indonesian Newspapers in the Era of Megawati Administration*. Disertasi ini sudah selesai saya tulis tapi belum diuji. Lewat sekelumit cerita di atas saya hanya ingin menegaskan bahwa tidak mudah menjaga jurnalisme tidak meluncur pada sisi bombastis. Sekalipun *Rakyat Merdeka* ingin mempraktikkan jurnalisme *to the point*, ia kadang-kadang meluncur pada jurnalisme bombastis. Ini tentu saja jadi masalah dalam memberitakan keburukan di Indonesia. Pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana memberitakan keburukan agar jurnalisme tidak memproduksi keburukan? Berangkat dari pertanyaan tersebut, tulisan ini mencoba mengelaborasinya.

### **Hakikat Berita Buruk**

Ketika seorang wartawan melaporkan berita buruk, sebenarnya ia merekonstruksi realitas sosial yang buruk. Ia tidak bermaksud menjelek-jelekkan, katakanlah, pemerintah. Wartawan juga tidak bermaksud mencari popularitas. Ia bahkan bisa disebut membantu melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Lewat berita itu, ia ingin menggugah kesadaran khalayak bahwa ada realitas buruk menyangkut pembangunan.

Bagi khalayak, sebenarnya berita buruk belum tentu akan menjadikan mereka tertarik untuk berbuat buruk pula. Paling tidak ada dua alasan yang menjadi penyebabnya: *Pertama*, tindakan seorang individu tidak pernah datang begitu saja. Tindakan itu lahir karena sudah ada sikap yang mendukungnya. Sikap itu sendiri muncul dari wawasan yang sudah ada. Kalau ada seorang individu terlibat korupsi, sebenarnya ia sudah punya wawasan tentang bagaimana melakukan korupsi. Ia setuju untuk melakukan korupsi. Lalu, muncul pemicu untuk melakukan korupsi, misalnya temannya yang juga korupsi atau berita tentang korupsi. Jika terakhir ini yang terjadi, sesungguhnya berita buruk hanya memicu seorang individu untuk melakukan korupsi.

*Kedua*, segenap individu sesungguhnya melakukan klasifikasi, interpretasi, dan organisasi pengalaman hidup serta hasil pembelajaran mereka. Dari sini muncul beberapa kategori sosial. Kategori-kategori sosial ini mereka gunakan untuk menapis segala informasi yang sampai pada mereka. Tegasnya, khalayak tidak begitu saja menerima informasi. Mereka mengkritisnya sesuai dengan kemampuan.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan penulis di Kantor Redaksi *Rakyat Merdeka*, Jakarta, 22 Maret 2006

Sementara bagi media pers, seperti ditulis Gans (dalam Severin & Tankard, Jr, 1992: 305), penyiaran berita buruk merupakan cerminan sikap mendukung demokrasi altruistik. Artinya, media pers tersebut bersikap demokratis untuk kebaikan bersama. Media pers tidak *sok* kuasa. Media pers bahkan berbuat baik untuk mengingatkan pemerintah. Itulah sebabnya media pers akan selalu menyiarkan berita buruk.

Maka, biarkanlah pers menyiarkan berita buruk. Biarkanlah pula khalayak memperoleh berita buruk. Kalaupun ada hal yang perlu dipermasalahkan menyangkut berita buruk, maka ia adalah soal bagaimana membahasakan fakta sehingga menjadi berita yang objektif. Tegasnya, bagaimana mengemas realitas sosial yang buruk sehingga menjadi berita yang apa adanya?

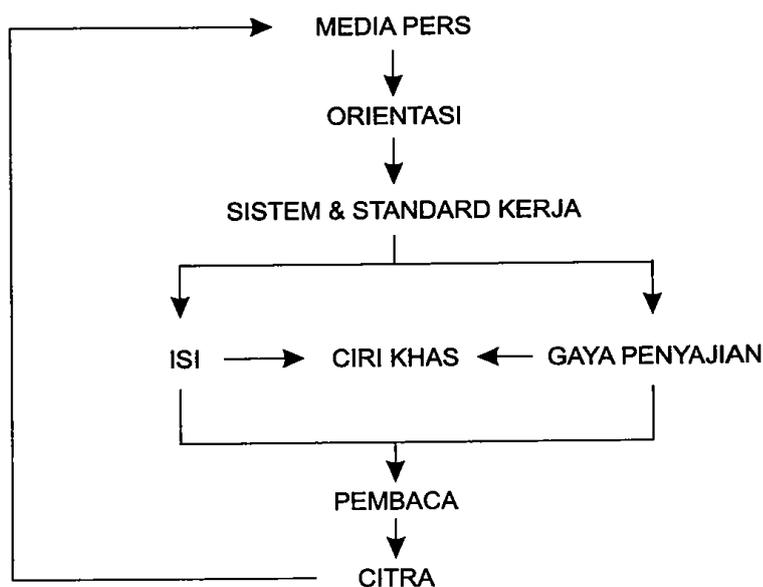
### Citra Media Pers

Setiap media pers punya standar kelayakan terbit. Standar kelayakan terbit itu berasal dari visi, atau gambaran ideal tentang media pers yang akan dibentuk<sup>7</sup>. Visi ini merupakan janji kepada khalayak dan karenanya harus ditepati. Kendati begitu, setiap media pers bebas merumuskan visinya sendiri. Artinya, tidak ada kekuatan yang bisa memaksa sebuah media pers untuk merumuskan visi tertentu.

Secara praktis standar kelayakan terbit berita sebuah media pers berujung pada: (i) muatan isi berita yang pantas disiarkan dan (2) gaya penyajian berita. Kedua aspek inilah yang menjadi jati diri sebuah media. Keduanya bisa terpenuhi berkat sistem dan standard kerja yang terumuskan secara operasional.

Bila dilihat lebih jauh, sistem dan standard kerja media pers diperoleh dari orientasi media pers itu. Maka, orientasi media pers sesungguhnya menjadi dasar yang kuat untuk menentukan cara penyajian berita. Rangkaian seluruh dimensi ini bisa dilihat pada skema berikut:

**Skema 1. Posisi Gaya Penyajian Berita**



<sup>7</sup> Visi itu sendiri diwujudkan dalam bentuk misi, yaitu hal yang harus dikerjakan oleh sebuah media pers.

Skema di atas memperlihatkan bahwa ciri khas sebuah media pers yang sampai ke tangan khalayak adalah muatan isi berita dan gaya penyajian berita. Dari ciri khas itulah khalayak memiliki citra tentang sebuah media pers. Jika saja ciri khas ini berkenan di hati pembaca dan kesannya tertanam lama dalam diri mereka, maka lahirlah citra positif tentang media pers bersangkutan. Sebaliknya, bila ciri khas sebuah media pers tidak berkenan di hati khalayak, maka muncul citra negatif tentang media pers tersebut. Seandainya yang terakhir ini terjadi, maka berita apa pun yang disiarkannya tidak akan mendapat sambutan hangat khalayak.

Dalam keadaan demikian, posisi muatan isi berita dan gaya penyajian berita menjadi sentral dalam menciptakan citra positif sebuah media pers. Itulah sebabnya media pers sangat berhati-hati dalam menentukan muatan isi berita yang layak terbit dan gaya penyajian berita yang harus dipakai dalam menyajikan berita tersebut. Persoalan yang kemudian muncul adalah, gaya penyajian seperti apakah yang cocok untuk berita buruk?

### **Jurnalisme Lugas**

Setiap media pers tentu mempraktikkan jurnalisme. Ada wartawan yang tahu pasti nama jurnalisme yang dipraktikkan media pers tempat dia bekerja, namun ada juga wartawan yang tidak mengetahuinya. Yang terakhir ini, misalnya, dialami oleh Elman Saragih, Redaktur Eksekutif *Media Indonesia*. Menurutnya, *Media Indonesia*, tidak memiliki nama jurnalisme yang dipraktikkan. *Media Indonesia* mengutamakan keberimbangan. Bahkan keberimbangan ini menjadi unsur penting dalam menyiarkan berita. *Media Indonesia* memberikan kesempatan yang sama kepada objek dan subjek berita untuk memberikan keterangan.

Meskipun demikian, dalam menyajikan berita, *Media Indonesia* menggunakan gaya bahasa yang lugas<sup>8</sup>. Gaya bahasa ini, bila dimaksudkan untuk menyajikan fakta secara akurat, merupakan jurnalisme biasa (*as usual*). Dalam operasi jurnalisme, gaya bahasa seperti ini berusaha menyajikan kebenaran apa adanya. Tidak heran bila jurnalisme seperti ini disebut jurnalisme lugas.

Keinginan *Media Indonesia* untuk menampilkan jurnalisme lugas juga diperlihatkan dengan menampilkan rubrik **Editorial** di halaman depan dengan bahasa yang lugas<sup>9</sup>. Bagi Surya Paloh, pemilik *Media Indonesia*, editorial *Media Indonesia* adalah sebuah pencerahan. Simaklah pendapatnya di bawah ini:

.....editorial *Media Indonesia* yang merupakan evolusi dari rubrik Selamat Pagi Indonesia di harian *Prioritas* yang harus dibreidel karena telah berani berterus terang, adalah perjuangan kebebasan berpendapat dan berpikir. Editorial, dengan demikian, boleh disebut sebagai ideologi pembebasan. Manusia

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Elman Saragih di Kantor Redaksi *Media Indonesia*, Jakarta, 21 Maret 2006.

<sup>9</sup> Berbeda dengan surat kabar lainnya, Editorial *Media Indonesia* tampil di halaman muka pada kuadran kedua. Editorial di *Media Indonesia*, seperti ditulis Anwari (2003:5) adalah tajuk rencana di surat-surat kabar lainnya yang ditulis secara lugas, kadang-kadang memperlihatkan satire.

Indonesia harus bebas dari rasa takut dan bebas untuk berterus terang. Karena syarat ini mutlak bagi tumbuhnya akal sehat dan kecerdasan (Paloh, 2003: xii).<sup>10</sup>

Tanpa bermaksud mempromosikan *Media Indonesia*, jurnalisme lugas yang ingin dipraktikkan *Media Indonesia* itulah jurnalisme yang ideal, jurnalisme *as usual*. Jurnalisme inilah yang harus dipraktikkan media pers dalam menyiarkan berita buruk. Dengan jurnalisme semacam ini, khalayak terangsang bebas bicara. Ini tentu saja sikap yang mulia. Ia akan merangsang keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi buruk yang menyebabkan lahirnya berita buruk. Dari keprihatinan inilah diharapkan lahir ide-ide besar dan cemerlang untuk memperbaiki situasi dan kondisi.

Ini barangkali berlawanan dengan pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa untuk tidak mengulangi keburukan realitas sosial, jurnalisme yang perlu dipraktikkan adalah jurnalisme halus, yaitu jurnalisme yang memakai gaya eufemisme. Jurnalisme seperti ini mengaburkan realitas. Akibatnya sudah dirasakan bangsa ini sampai sekarang. Gara-gara jurnalisme halus di zaman Orde Baru, setelah 32 tahun masyarakat baru mengerti bahwa “bantuan” yang disebut-sebut Soeharto ternyata “hutang”. Publik media terninabobokkan puluhan tahun. Apakah perlu mengulangi kesalahan yang sama?

Pada titik ini, saya setuju dengan Surya Paloh yang mengatakan bahwa rubrik *Editorial Media Indonesia* “digarap” oleh para jurnalis yang memiliki tradisi penulisan yang jernih serta jernih pula melihat paradoks berpikir khalayak kita. “Hanya dengan kejernihan seperti itu editorial tetap tampil sebagai teks yang mempesona. Ia mempesona sebagai naskah, dan juga mempesona sebagai pemikiran. Di situlah kekuatan *Editorial Media Indonesia*”, tambah Paloh (2003: xiv).

Bertolak dari sini, berita buruk yang ditampilkan segenap media pers harus ditulis oleh wartawan yang memiliki tradisi penulisan yang jernih serta ditulis dengan lugas. Dengan demikian, berita tersebut tampil sebagai teks yang mempesona. Dari pesona teks berita itu diharapkan muncul pemikiran khalayak yang mempesona pula. Kalau ini sudah terjadi, maka kita bisa berharap bahwa berita keburukan tidak menciptakan keburukan lagi, keburukan tak akan menjadi wabah. Lalu, mungkinkah kondisi kita kondusif untuk praktik jurnalisme lugas.

### **Munculnya *Public Sphere* tentang Keburukan**

Berkat runtuhnya Orde Baru, kini Indonesia memiliki kebebasan pers. Kebebasan ini menegaskan bahwa negara tidak lagi mengontrol dan mengawasi media pers. Negara memberi kesempatan kepada media pers untuk menyiarkan segala berita buruk sesuai dengan nilai-nilai yang dianut media. Hasilnya sangat mengagumkan, berbagai berita tentang keburukan sampai ke tangan khalayak. Lebih dari itu, berbagai pihak pun dapat kesempatan untuk membicarakan keburukan tersebut. Tengoklah

---

<sup>10</sup> Sebelum menjadi Pemimpin Umum surat kabar harian *Media Indonesia*, Surya Paloh menjadi Pemimpin Umum surat kabar harian *Prioritas*. Surat kabar yang terakhir ini dibredel rezim Soeharto 29 Juni 1987. Rubrik **Selamat Pagi Indonesia** waktu itu ditulis dengan bahasa yang lugas penuh humor dan menampung segala keluh-kesah masyarakat berdasarkan fakta-fakta keras tentang tercabiknya rasionalitas sosial (Anwari, 2003: 3).

misalnya, berita tentang kematian Cliff Muntu, madya praja Insititut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN). Berita tentang tewasnya Cliff Muntu dilengkapi dengan berita yang relevan dengan kemungkinan penyebab kematian Cliff: kekerasan yang terjadi di IPDN ketika bernama STPDN (Sekolah Pendidikan Tinggi Dalam Negeri). Hampir semua stasiun televisi menayangkan adegan kekerasan yang terjadi di STPDN. Penayangan adegan tersebut berlangsung beberapa kali. Tidak heran bila khalayak mulai memperhatikan kekerasan di IPDN.

Dalam waktu sekejap, perhatian khalayak terhadap kekerasan di IPDN berubah menjadi sebuah isu. Pihak-pihak yang punya kepentingan dengan isu ini mulai angkat bicara. Mereka menyampaikan pendapat dan penilaian moral lewat media. Apa yang terjadi kemudian adalah semacam diskusi publik di media tentang kekerasan di IPDN.

Mungkin media pers tidak menyadari apa yang sesungguhnya terjadi dengan diskusi tersebut. Tetapi, dilihat dari perspektif ilmu komunikasi, yang sebenarnya terjadi adalah media pers telah menciptakan *public sphere* tentang kekerasan di IPDN. Ini bisa dilihat dari kenyataan: (i) ada informasi dan diskusi tentang kekerasan di IPDN; (ii) diskusi tentang kekerasan di IPDN berlangsung secara terbuka, tanpa tekanan; (iii) semua pihak bebas menyampaikan idenya tentang kekerasan di IPDN; dan (iv) diskusi bertujuan untuk membentuk kesadaran khalayak tentang masalah yang terjadi di IPDN dan mendorong terjadinya perbaikan. Semua ini sesuai dengan konsep *public sphere* yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas.

*Public sphere* yang diciptakan media pers tentang kekerasan di IPDN memang hanya satu contoh *public sphere* yang bicara perkara keburukan. Tetapi, contoh ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa media pers, kalau mau, bisa menciptakan *public sphere* lainnya tentang keburukan. Ia juga menjadi isyarat bahwa media pers punya kebebasan untuk menyiarkan berita tentang keburukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Maka, persoalan yang kemudian muncul adalah, apakah wartawan bersedia memanfaatkan kebebasan yang tersedia?

### **Posisi Wartawan**

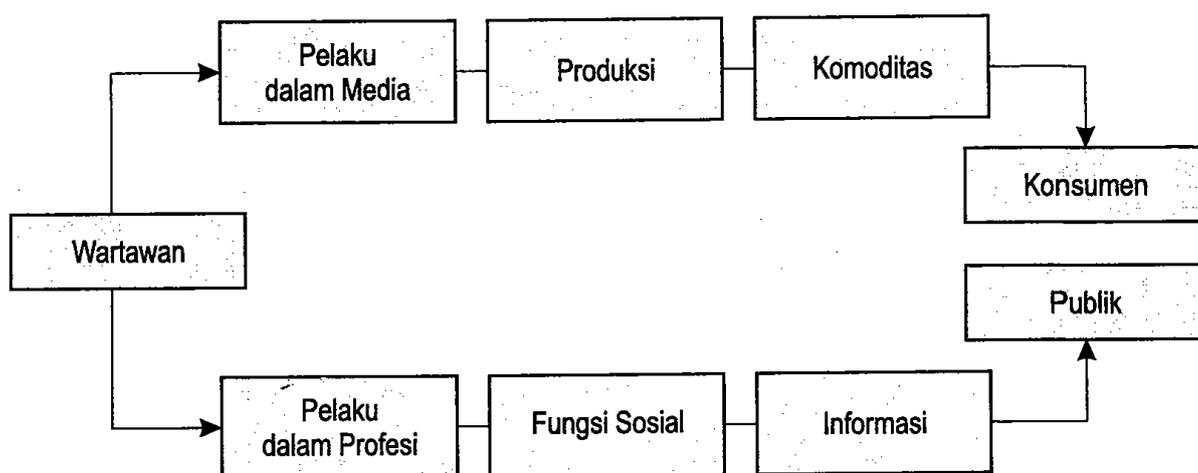
Pesan sentral yang dibawa oleh buku *The Elements of Journalism* yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) menegaskan, jurnalisisme baru bisa disebut melaksanakan tugasnya dengan baik bila wartawan mampu melaksanakan sembilan tugas pokok. Sembilan tugas pokok tersebut meliputi: (i) menyampaikan kebenaran; (ii) loyal kepada khalayak; (iii) selalu memverifikasi informasi; (iv) bersikap independen; (v) memonitor elite kekuasaan secara independen; (vi) menyediakan lahan buat kritik dan pendapat khalayak; (vii) menyajikan informasi yang benar-benar penting dan relevan; (viii) menyajikan berita secara lengkap dan proporsional; dan (ix) menulis dengan menyertakan nati nurani (Kovach & Rosenstiel, 2001:12-13).

Tetapi, tidak banyak orang yang ingat bahwa kesembilan tugas pokok jurnalisisme tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh seorang wartawan yang hanya memandang dirinya melulu sebagai pelaku dalam profesi. Dalam posisi seperti ini, ia melakukan fungsi sosial. Hasil yang ia peroleh adalah informasi. Informasi inilah yang kemudian disampaikan kepada khalayak sebagai publik. Padahal wartawan juga pelaku dalam

media pers. Dalam posisi seperti ini, ia memfungsikan dirinya sebagai alat produksi. Hasil yang dia peroleh adalah komoditas. Komoditas inilah yang kemudian disampaikannya kepada khalayak sebagai konsumen. Kalau posisi ini yang diambil, tentu wartawan hanya akan memperturutkan nafsu media pers tempatnya bekerja untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Harapan khalayak untuk memperoleh kebaikan dari berita buruk jadi sirna.

Lalu, apakah kita akan menyarankan agar wartawan hanya memposisikan dirinya sebagai pelaku dalam profesi saja? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita lihat dulu gambaran tentang posisi wartawan dalam skema berikut:

**Skema 2. Posisi Wartawan**



Skema di atas memperlihatkan bahwa seorang wartawan selalu memiliki dua posisi: sebagai pelaku dalam media dan pelaku dalam profesi. Dia tidak bisa memilih satu posisi saja. Ibarat kaki, satu kakinya terikat sebagai pelaku dalam media pers dan satu lagi terikat sebagai pelaku dalam profesi. Ke mana pun dia melangkah, kedua posisi itu dibawanya serta. Maka, kita bisa mengatakan bahwa tidak mudah bagi wartawan untuk selalu mentaati posisinya sebagai pelaku dalam media dan pelaku dalam profesi.

Kendati begitu, ada aturan yang harus ditaati para wartawan dalam memenuhi posisinya sebagai pelaku dalam media dan pelaku dalam profesi. Sebagai pelaku dalam media pers, seorang wartawan harus menaati *Code of Conduct*. Sedangkan sebagai pelaku dalam profesi, ia harus mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sepanjang ia sudah mentaati kedua aturan ini, sesungguhnya ia sudah bisa memenuhi kedua posisi tersebut.

Bertolak dari keadaan ini, tentu kita tidak akan menyarankan agar wartawan hanya peduli dengan fungsinya sebagai pelaku dalam profesi saja. Tetap saja wartawan harus peduli juga dengan fungsinya sebagai pelaku dalam media pers. Dengan kata lain, wartawan bebas memberitakan keburukan sepanjang tidak menyalahi KEJ dan *Code of Conduct* media pers tempat mereka bekerja. Kalau sebuah media pers sengaja menyusun *Code of Conduct*-nya demi memperoleh keuntungan materi sebanyak-banyaknya, itu hak media pers tersebut. Kalau sebuah media pers menyiarkan berita tentang keburukan hanya demi memperoleh keuntungan materi semata, khalayak harus melupakan media

pers bersangkutan. Khalayak malah boleh memboikot media itu dan segera mencari media pers yang lain.

### **Penutup**

Uraian di atas telah menjelaskan bahwa ditinjau dari sisi media pers dan khalayak, penyiaran berita buruk bermanfaat buat perkembangan demokrasi. Wajar bila segenap media pers akan berusaha untuk selalu menyiarkan berita buruk. Berbarengan dengan ini, muncul pertanyaan, bagaimana mengemas berita buruk?

Kita tidak bisa memaksa sebuah media pers untuk mengemas berita buruk sesuai dengan selera kita. Bagaimanapun sebuah media pers punya visi, misi, orientasi, sistem, dan standard kerja sendiri. Semua aspek ini melahirkan jati diri media pers bersangkutan. Kalau ada sebuah media pers memiliki citra bahwa ia mempraktikkan jurnalisme makna, itu menjadi hak media bersangkutan dan harus dihormati.

Kendati demikian, kita bisa mengusulkan agar berita buruk disajikan dengan bahasa yang lugas. Artinya, jurnalisme yang dipakai untuk menyajikan berita buruk sebaiknya jurnalisme lugas. Dengan jurnalisme semacam ini diharapkan keburukan tidak beranak-pinak. Praktik jurnalisme lugas ini sekarang sudah bisa dilaksanakan dengan sempurna sebab sudah ada contoh konkret keberhasilan media pers membangun *public sphere* tentang realitas buruk. Hanya saja, kita tidak bisa memaksa wartawan untuk hanya menjalankan fungsinya sebagai pelaku dalam profesi saja pada saat menyiarkan berita buruk. Bagaimanapun wartawan harus juga menjalankan fungsinya sebagai pelaku dalam media.

### **Daftar Pustaka**

- Abrar, Ana Nadhya. 2006. *The Press Inclination in Reporting the Parliament: Learning from the Three Major Indonesian Newspapers in the Era of Megawati Administration*. Disertasi yang akan diserahkan kepada Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Kovach, Bill & Tom Rosenstiel. 2001. *The Elements of Journalism*. New York: Three Rivers Press.
- MWK, Anwari. 2003. "Prolog: Anatomi Editorial Media Indonesia". Dalam Tim Redaksi LP3ES. *Politik Editorial Media Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Paloh, Surya. 2003. "Sekapur Sirih". Dalam Tim Redaksi LP3ES. *Politik Editorial Media Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Severin, Werner J dan James W Tankard, Jr. 1992. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media, Third Edition*. New York: Longman.

